

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .

Pembangunan dalam arti yang luas meliputi pembangunan dalam segala bidang tidak hanya dipandang dari fisik, ataupun non fisik saja, tetapi bidang kesehatan tidak kalah pentingnya dibanding bidang-bidang yang lainnya, untuk dapat mewujudkan suatu pembangunan semua bidang harus berjalan selaras dan seimbang. Pembangunan nasional akan dikatakan berhasil bukan hanya dari kemajuan bidang fisik saja, ataupun bidang ekonomi saja, tetapi juga kemajuan di bidang-bidang yang lainnya juga, termasuk kemajuan dibidang kesehatan.<sup>1</sup>

Berbicara tentang kesehatan yang sangat diperlukan oleh setiap orang, bangsa dan negara sudah selayaknya setiap warga negara yang baik selalu memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya dengan sebaik-baiknya. Ini berarti sudah merupakan sumbangan yang besar terhadap usaha kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan dasar manusia untuk memulai suatu kegiatan termasuk untuk



Pembangunan kesehatan masyarakat pada dasarnya diarahkan agar masyarakat dapat menentukan dan mengetahui masalah-masalah yang menyangkut kesehatan serta jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah penyakit baik menular maupun tidak menular. Di dalam pelaksanaan pembrantasan penyebaran wabah penyakit *endemi* haruslah mendapatkan pengarahan dan bantuan teknis dari pemerintah karena pemerintah adalah suatu lembaga yang memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa memandang mana yang kaya dan yang miskin. Yang kaya tidak telalu bergantung pada pemerintah dalam hal mendapatkan jaminan kesehatan. Tapi bagi masyarakat yang miskin harapan satu-satunya adalah pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan, karena kemampuan pemerintah tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terkadang menimbulkan tidak meratanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terutama pada daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah terwujudnya masyarakat kabupaten Tegal yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Kabupaten sehat).

Untuk mencapai Visi Kabupaten Tegal Sehat Dinas Kesehatan menetapkan 6 Misi Pembangunan Kesehatan antara lain:

1. Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit.

Menyelenggarakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit yang lebih bermutu dengan mengalang kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit berupaya untuk melaksanakan kesepakatan global;

mencegah timbulnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dengan mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi; mengurangi morbiditas dan mortalitas serta membatasi kecacatan dengan penemuan dini dan pengobatan penderita; membatasi transmisi penyakit melalui pengendalian populasi dan pemberantasan vektor; mencegah timbulnya kejadian luar biasa melalui sistem kewaspadaan dini.

## 2. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Lingkungan.

Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan secara profesional melalui pemantauan, pengawasan, peningkatan kualitas lingkungan, dan kerja sama lintas sektor/ lintas program serta pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang aman bagi kesehatan yang mengandung makna bahwa upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari timbulnya penyakit berbasis lingkungan, gangguan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan faktor-faktor lingkungan yang menjadi sumber penyakit berbasis lingkungan, melindungi sumber daya manusia dari resiko dan gangguan kesehatan akibat perubahan kualitas kesehatan lingkungan serta memberdayakan masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, produktif dan kondusif guna terwujudnya lingkungan yang aman bagi kesehatan.

## 3. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Keluarga

Menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga yang bermutu dengan bertumpu pada petugas yang profesional dan kemandirian masyarakat yang mengandung makna upaya kesehatan keluarga dilaksanakan dalam rangka kesehatan keluarga melalui pelayanan secara profesional pada kesehatan keluarga dan anak, meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat

dalam mengatasi masalah gizi, peningkatan status gizi dan peningkatan kesehatan usia lanjut.

#### 4. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Oleh Masyarakat.

Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan profesional serta meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta yang mengandung makna bahwa upaya kesehatan dasar dilaksanakan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat guna pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi segenap warga baik individu, keluarga maupun masyarakat dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang di dukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif agar terwujud pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang optimal, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat dengan mengikutsertakan peran secara aktif masyarakat dan berbagai potensi masyarakat.

#### 5. Menyelenggarakan Upaya Promosi Kesehatan.

Menyelenggarakan upaya promosi kesehatan dengan menumbuhkan peran serta masyarakat dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang mengandung makna bahwa upaya promosi kesehatan di laksanakan guna mendorong terwujudnya gerakan Pembangunan Kabupaten Tegal yang berwawasan kesehatan; mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan intitusi, mendorong

dan terjangkau masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.

#### 6. Menyelenggarakan Upaya Manajemen Kesehatan.

Menyelenggarakan upaya manajemen kesehatan dengan SOP yang mantap Sistem Informasi Kesehatan yang handal di setiap jenjang administrasi pelayanan kesehatan yang mengandung makna bahwa kegiatan manajemen kesehatan dilaksanakan guna mewujudkan peningkatan fungsi pelaksanaan, pergerakan/ pelaksanaan; peningkatan pengelolaan administrasi kesehatan,

peningkatan pengorganisasian dan penata pelaksana tugas di bidang kesehatan; serta peningkatan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian upaya kesehatan dengan di dukung dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis komputer yang terpadu di setiap jenjang administrasi di semua pelayanan kesehatan.

Kebijakan pembangunan kesehatan lebih di arahkan dan diprioritaskan pada upaya pelayanan kesehatan dasar dengan memperhatikan pergeseran paradigma pembangunan dari sisi pasokan (Supplying) di geser menjadi tuntutan masyarakat (Demand), pergeseran dari medicalcare ke health care sehingga setiap upaya pengulangan masalah kesehatan selalu ditarik ke hulu, dengan demikian aspek promotif dan preventif akan lebih menonjol dibanding kuratif<sup>4</sup>

Keberhasilan pembangunan kesehatan, perilaku hidup sehat, dan pembrantasan wabah penyakit tersebut harus melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat dan tidak hanya di tentukan oleh sektor kesehatan semata melainkan

yang sehat. Namun demikian Dinas Kesehatan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang sehat.

Skripsi ini mengambil judul "PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL DALAM MENANGGULANGI PENYAKIT ENDEMI UNTUK MENUJU KABUPATEN TEGAL SEHAT 2010 ".Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut diatas maka sebagai penulis menekankan bahwa dalam hal ini faktor-faktor apa saja yang terjadinya penyebaran penyakit endemi dan penghambat tercapainya pembangunan Kesehatan untuk menuju Kabupaten Tegal sehat 2010

Tujuan penulis dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang mendasar akan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam menekan penyebaran penyakit endemi secara menyeluruh, atau masih setengah-setengah. Disebabkan oleh faktor dari masyarakat itu sendiri yang kurang memahami hidup sehat dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan dalam sektor kesehatan dan kewaspadaan atas dampak dari penyakit endemi untuk menuju kabupaten Tegal sehat 2010.

Berdasarkan judul skripsi di atas, skripsi ini adalah suatu kajian tentang Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam mengantisipasi penyebaran penyakit endemi untuk menuju Kabupaten Tegal sehat 2010.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

### **1. Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Mewujudkan**

Kabupaten Tegal Sehat 2010 dan Pembangunan Pembangunan Penyakit

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam pembangunan kesehatan untuk menuju Kabupaten Tegal Sehat 2010 dan penanggulangan penyebaran penyakit endemi.

## C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Mewujudkan Kabupaten Tegal Sehat 2010 dan Penanggulangan Penyebaran Penyakit Endemi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam pembangunan kesehatan untuk menuju Kabupaten Tegal Sehat 2010 dan penanggulangan penyebaran penyakit endemi serta untuk mengetahui peran dinas Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Kabupaten Tegal sehat 2010 dan penengulangan penyebaran penyakit endemi.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah bagi kajian ilmu hukum terutama tentang hukum kesehatan
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan melalui Program Tegal sehat 2010 dan pemberantasan penyakit endemi.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah disadur kata *autonomi* (Bahasa Belanda) dan ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu *Autos* yang berarti sendiri dan dari *nomos* yang berarti

Mascab mendefinisikan pemerintah daerah sebagai “Satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah”.<sup>8</sup>

Menurut Mashuri Maschab sendiri, Pemerintah Daerah adalah “Satuan aparatur negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri didalam lingkungan negara”.<sup>9</sup> Jadi pemerintah daerah merupakan badan, organ atau aparatur yang berwenang mengatur, menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintah wilayah dalam waktu tertentu. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah : penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimagsud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan otonom, daerah mempunyai hak dan kewajiban:

1. Hak Daerah :

- a. Mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

<sup>8</sup> Mashuri Maschab, *Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Fkip UGM, 1982, hal. 32

h. Mendapatkan hak lainya yang diatur dalam peraturan dalamperaturan perundang-undangan

2. Kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan .
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan nilai sosial budaya
- l. Mengelola admintrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan kewenangannya dan
- o. Kewajiban lain diatur dalam peraturan perundangan-undangan

Dinas Daerah adalah perangkat pemerintah daerah untuk melaksanakan unsur-unsur pemerintah yang telah diserahkan menjadi wewenang otonomi, baik berdasarkan undang-undang pembentukannya maupun dengan peraturan pemerintah.

Kedudukan Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah tercantum

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diperhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### 3. Implementasi Kebijakan

#### a. Kebijakan

##### 1) Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.<sup>10</sup>

Hein dan Eulau menyatakan (policy) adalah suatu keputusan yang tetap di tandai dengan adanya perhubungan dan keberluangan pada bagian-bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya.<sup>11</sup>

Rumusan lain yang menekankan pada prosesnya adalah dikemukakan oleh Carl J. Friederick yang menyatakan policy adalah tindakan yang di usulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

##### 2) Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan bukan hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, pelaksanaan kebijakan menyangkut

<sup>10</sup> Hoogerweef, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, 1983, hal 4.

<sup>11</sup> Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal 26.

<sup>12</sup> Op. Cit, hal 6.

a) Pematapan Kerja sama Lintas Sektoral

Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan berwawasan kesehatan, maka kerjasama lintas sektoral merupakan hal yang utama, dan karena itu perlu digalang serta lebih dimantapkan secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor dapat mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

b) Peningkatan Perilaku dan Kemandirian Masyarakat

Perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan agar menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. serta mewujudkan pembangunan Kesehatan Kabupaten Tegal

c) Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja, dan tempat-tempat umum serta tempat-tempat pariwisata, ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi syarat kesehatan, penyediaan sarana pembuangan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya sehingga penduduk dapat hidup sehat dan produktif serta terhindar dari penyakit yang

ditimbulkan melalui air yang disebabkan oleh

masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan<sup>13</sup>.

### 3) Faktor-Faktor

Faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai:

#### a. Komunikasi

Yaitu tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

#### b. Sumber Daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksana.

#### c. Sikap pelaksana/diposisi

Sikap pelaksana yang ekomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu program.

### b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang lengkap akan sangat membantu terhadap pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan

#### 1. Kebijakan Kesehatan

Didalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Bab IV, Pasal 9 menyatakan bahwa :

“Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.”

Dalam Undang-Undang ini jelas dinyatakan apa yang menjadi hak dan apa-apa yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan, yaitu :

- a) Berhak: memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (jasmani, rohani dan sosial).
- b) Wajib: aktif ikut serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mencapai pembangunan khususnya dibidang Kesehatan

Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Bab I Pasal 1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang-orang lain. Sedangkan kesehatan sosial perikehidupan dalam masyarakat, perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati liburan pada waktunya.

## 2. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten

Dinas Kesehatan kabupaten tegal dalam menciptakan lingkungan serta

d) Peningkatan Upaya/Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka memperhatikan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk dampak krisis di samping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan melalui upaya promotif dan preventif kesehatan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan. Perhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok yang beresiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif.

e) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembiayaan kesehatan ditingkatkan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat yang dikelola secara berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

f) Peningkatan Kebijakan dan Manajemen pembangunan Kesehatan

Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ditingkatkan terutama melalui peningkatan strategis kerjasama

Antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan diantara berbagai program kesehatan antara pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri.

g) Peningkatan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap

penggunaan Sediaan farmasi, Makanan, Alat dan Obat-obatan

pendukung kesehatan yang tidak Absah/Ilegal peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan, alat dan obat-obatan yang tidak absah/ilegal dilaksanakan melalui pencegahan beredarnya produk yang tidak sesuai persyaratan mutu, manfaat/khasiat dan keamanan dan memperluas jangkauan pengawasannya.<sup>14</sup>

### **c. Batasan Pengertian**

#### **a. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal**

Dinas kesehatan Kabupaten Tegal sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, peran yang akan dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Tegal Sehat 2010 sesuai dengan visi Dinas Kesehatan yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah Terwujudnya Kabupaten Sehat 2010. guna menunjang visi tersebut Dinas Kesehatan menetapkan 6 Misi dan Setrategi Pembangunan Kesehatan antara lain:

- 1) Menyelenggarakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit
- 2) Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan
- 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga
- 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau oleh masyarakat
- 5) Menyelenggarakan upaya promosi kesehatan
- 6) Menyelenggarakan upaya manajemen kesehatan

#### **Setrategi**

- 1) Peningkatan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan.
- 2) Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan serta pemberian otonomi fungsional pada unit pelayanan kesehatan.

<sup>14</sup> Rencana Kabupaten Tegal 2004



## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Responden

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai narasumber

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, antara lain :

- 1) Kepala Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit.
- 2) Sub Bagian Rencana dan Informasi.

### **3. Jenis data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang di peroleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, laporan hasil penelitian, data statistik, media masa dan dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan penulis adalah:

### 1. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan pemanfaatan data sekunder yang di peroleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi.

### 2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

### 4. Analisa Data

Teknik menganalisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang di peroleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data diperoleh dari naskah, wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperhatikan validas, reabilitas dan objektivitas.<sup>16</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, landasan teori, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Menguraikan tentang sejarah kesehatan masyarakat, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, ruang lingkup kesehatan, Kedinasan,

<sup>16</sup> Lenny I. Mahana. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992

upaya kesehatan masyarakat, manajemen pelayanan kesehatan masyarakat.

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Analisa data yang akan di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memahami dan menafsirkan data yang sudah terkumpul menurut perspektif penulisan yang di dasarkan pada apa yang di dapatkan oleh penulis yang ada di dalam literature, penelitian dilapangan serta hasil-hasil Departemen kesehatan dalam menanggulangi penyakit Endemi, serta objek penelitian yaitu puskesmas Kupu setelah diolah, upaya selanjutnya adalah menuangkanya dalam bentuk sekripsi yang disusun secara sistematis :

- A. Gambaran umum kabupaten Tegal
- B. Upaya kesehatan
- C. Faktor pendukung dan penghambat